

Peran Partai Islam dalam Proses Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

M. Zainal Anwar

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Dalam rentang sejarahnya, kontribusi partai politik Islam di Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi selalu mengalami pasang surut. Pasca turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, kehadiran partai Islam kembali menyeruak dan mewarnai kehidupan kepartaian di Indonesia. Lantas, apa saja kendala saat ini yang dihadapi partai Islam di Indonesia yang sedang menapaki masa konsolidasi demokrasi? Apa saja peran yang bisa dimainkan?

Inilah beberapa persoalan yang akan diurai di tulisan ini. Adapun titik perhatian yang akan diberikan oleh penulis adalah kontribusi partai Islam di era konsolidasi demokrasi.

Kata Kunci: Partai Politik Islam dan Konsolidasi Demokrasi

Jika seseorang bisa memisahkan gula dari rasa manisnya, maka ia akan dapat memisahkan agama Islam dari politik (Jackson & Pye, 1978: 213)

Pendahuluan

Peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie pada 21 Mei 1998 menandai fase baru kehidupan politik di Indonesia. Masyarakat menyebut era transisi politik ini dengan masa reformasi, model yang sebenarnya tidak lazim dalam studi transisi politik. (Huntington, 1995: 158-203) Dampak dari peralihan tersebut telah membawa angin baru bagi dunia politik di Indonesia. Era liberalisasi politik ini ditandai oleh banyak hal, diantaranya adalah kebebasan pers, ideologi organisasi yang tidak lagi tunggal, maupun pendirian partai politik.

Dalam konteks Islam politik, respon yang diberikan sebagian umat Islam adalah dengan membentuk kembali partai politik Islam. (Zainal Abidin Amir, 2003: 20) Sebuah fenomena yang tentunya tidak lazim, bahkan mustahil, pada era orde baru. Setelah merasa terpinggirkan dan hanya berkuat pada wilayah kultural, Islam politik pun tampil ke publik dengan wajah yang lebih jelas; partai politik.

Berbicara tentang partai Islam pasca-Soeharto memang suatu hal yang menarik. Bagi sebagian orang inilah lembaran berikut dari sejarah Islam politik di Indonesia, setelah sebelumnya pernah

mengalami “tutup buku” ketika PPP dipaksa menanggalkan asas Islam-nya, dan diganti dengan asas Pancasila oleh penguasa orde baru. (M. Imdadun Rahmat, 1999: . 4).

Perubahan politik dari era otoriter menuju demokrasi, pada dasarnya bukanlah alur yang linier. Gerak perubahan yang diupayakan menuju fase demokrasi, pada kenyataannya, selalu menghadapi berbagai tantangan, utamanya dari kelompok *status quo*.

Pada kondisi inilah, upaya mengkaji konsolidasi demokrasi menemukan titik relevansinya. Perubahan politik masyarakat dalam era transisi ini, sesungguhnya bisa berjalan kemana saja. Ia bisa berjalan menuju fase demokrasi, tapi juga bisa berbalik arah ke era otoriter. Sejarah mencatat, pola demokrasi yang dihasilkan oleh transisi yang tidak sempurna adalah demokrasi yang rentan (*unconsolidated democracy*). (Sutoro Eko, 2003:xxxiv)

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, peran partai politik tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai institusi demokrasi, secara teoretis, ia bisa menghidupkan demokrasi. Organisasi kekuasaan ini juga bisa berperan sebagai institusi yang mengkonsolidasikan massa. Selain itu, ia juga berpotensi “membunuh” demokrasi, mengobrol janji atau menjadi organisasi yang justru melindungi *status quo*.

Salah satu fakta menarik, dalam mengkaji konsolidasi demokrasi di Indonesia, adalah melihat dinamika partai Islam yang memperlihatkan adanya kemajemukan umat Islam dan keberagaman kepentingan kelompok Islam. Dalam pemilu 1999, dari 48 kontestan pemilu, 12 diantaranya adalah partai politik yang secara formal menjadikan Islam sebagai asasnya, masih ditambah dengan lima partai lainnya yang berasas Islam dan Pancasila. (Manan, 2005 :134-135)

Adapun pada pemilu 2004 lalu, dari 24 kontestan, ada 5 partai yang secara formal menjadikan Islam sebagai asasnya, yakni PPP, PKS, PBR, PBB, dan PPNUI, dan dua partai yang berideologi Pancasila dengan umat Islam sebagai basis utamanya, yakni PAN dan PKB.

Atas dasar fakta di atas, pertanyaan yang patut diajukan adalah, faktor-faktor apa saja yang membuat demokrasi tidak terkonsolidasi (*unconsolidated democracy*) dari perspektif partai Islam? Lalu, sejauh mana peran yang bisa diberikan dan dimainkan partai-partai Islam dalam era konsolidasi demokrasi?

Tulisan ini memfokuskan diri untuk mengkaji peran partai Islam dalam proses konsolidasi demokrasi. Penulis berupaya menggali problematika partai Islam dan kaitannya dengan konsolidasi

demokrasi. Disamping itu, diupayakan pula sebuah analisis untuk membaca kemungkinan kontribusi partai Islam yang signifikan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, agar arahnya "tidak tersesat" ke era otoriter. Sebelum masuk pada catatan akhir, penulis memberi ruang khusus tentang PKS, sebagai cermin bagi partai Islam ketika hendak berperan dalam konsolidasi demokrasi.

Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi; Penghampiran Teori

Penjelasan teoritis tentang partai politik sebagai instrumen demokrasi dan perannya dalam konsolidasi demokrasi, akan dimulai dari teori transisi politik. Transisi politik merupakan masa peralihan dari era otoriter menuju fase demokrasi. Dalam tahapan transisi ini, tipe-tipe yang lazim dijadikan rujukan adalah kategorisasi yang dibuat Huntington. Model-model tersebut adalah; *transformation* (elit sebagai promotor atau inisiator perubahan), *replacements* (oposisi sebagai promotor atau inisiator perubahan), dan *transplacements* (hasil negosiasi antara elit penguasa dan oposisi). (Huntington, 1995: 158) Tipologi lain yang belum disentuh Huntington adalah tipe intervensi, yakni perubahan otoriter menjadi demokrasi dengan intervensi negara lain, terutama militer.

Salah satu catatan penting dari proses terjadinya transisi ini adalah upaya konsolidasi demokrasi, utamanya dari aktor-aktor pro-demokrasi. Di beberapa negara yang berhasil menumbangkan rezim otoriter, kemudian memasuki proses transisi yang diawali liberalisasi politik, seringkali gagal bergerak menuju konsolidasi demokrasi. Idealnya, fase liberalisasi harus disusul oleh fase instalasi dan konsolidasi demokrasi (Manan, 2005).

Larry Diamond menegaskan, demokrasi akan bertahan hanya karena tidak ada pilihan lain, atau tiadanya alternatif yang lebih baik. Jika negara-negara yang masih dangkal dalam berdemokrasi dan baru berbentuk, tidak dapat memperkuat institusi-institusi politiknya, memperbaiki fungsi demokrasi, menghasilkan komitmen-komitmen dukungan yang lebih aktif, positif dan terasakan di tingkat elit dan massa, maka negara-negara tersebut akan mengalami kemunduran dan bahkan merobohkan bangunan demokrasinya. Dalam konsolidasi demokrasi, yang terlibat bukan hanya individu saja. Lebih dari itu, ia memerlukan beberapa aktor-aktor politik seperti; partai politik, serikat buruh, asosiasi bisnis, organisasi mahasiswa dan sebagainya.

Dalam konteks norma dan kepercayaan, semua partai, kelompok kepentingan dan gerakan sosial yang signifikan secara politik, mendukung (minimal tidak menolak) legitimasi demokrasi, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga konstitusional spesifik negara tersebut. Dengan norma yang demikian, maka perilaku yang harus dilakukan adalah, tidak ada partai, kelompok kepentingan, gerakan, atau lembaga yang signifikan secara politik, yang berusaha menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode inkonstitusional atau anti demokrasi lainnya sebagai taktik yang disengaja dalam mengejar kekuasaan atau sasaran-sasaran politik lain.

Dalam konsolidasi demokrasi, tantangan-tantangan yang dihadapi rezim demokrasi biasanya bervariasi sifat dan kekuatannya. Bagi Diamond, ada tiga tugas utama yang harus ditangani semua negara demokrasi yang baru dan masih rapuh, jika mereka ingin terkonsolidasi. Tiga hal tersebut adalah; penguatan demokrasi, pelembagaan politik, dan kinerja rezim. (Diamond, 2003). Terkait pelembagaan politik, konsolidasi demokrasi harus memenuhi penguatan tiga tipe lembaga politik; aparat administratif negara (birokrasi); lembaga-lembaga perwakilan dan penyelenggara demokrasi (partai politik, legislatif, dan sistem pemilu); dan struktur-struktur yang menjamin akuntabilitas horisontal, konstitusionalisme, dan *rule of law*, seperti sistem peradilan.

Partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Huntington menilai, dalam beberapa hal, partai politik menjadi begitu penting sebagai sarana mengorganisir dan menata perluasan partisipasi. Sedangkan Diamond menandaskan, partai politik merupakan kerangka kerja kelembagaan yang sangat penting bagi perwakilan dan pemerintahan dalam sebuah demokrasi. (Diamond, 2005:116)

Bagi Diamond, partai politik dapat memajukan demokrasi ketika anggotanya memiliki pemahaman yang rasional tentang program atau misi mereka; ketika mereka semakin kompleks baik secara horisontal dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan berbagai sub unit khususnya, maupun secara vertikal dalam jangkauan ke tingkat warga negara; dan ketika mereka telah membangun kemandirian dari lembaga negara lainnya dan dari pusat-pusat kekuasaan sosial-politik. Jika kondisinya demikian, Diamond optimis partai politik akan efektif. Sebagai tambahan, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan spesialisasi

fungsional-fungsional baru, mengembangkan kepedulian yang substansial, membangun kemampuan teknis, dan menyertakan kelompok-kelompok yang baru tumbuh.

Diamond menilai, hanya partai politik yang dapat menempa beragam identitas, kepentingan, pilihan, dan hasrat menjadi sebuah undang-undang, bantuan, kebijakan, bahkan koalisi. Karena itu, derajat tertentu pada kelembagaan sistem partai politik – dengan partai-partai yang memiliki organisasi mandiri dan efektif, dan hubungan yang mapan dan relatif stabil dengan blok-blok suara dan organisasi sosial–nampaknya merupakan sebuah syarat penting bagi konsolidasi demokrasi.(Diamond, 2005:118)

Sementara Mohtar Mas'ood menjelaskan, peran partai politik dalam konsolidasi demokrasi akan maksimal jika masa hidup partai politik cukup panjang, dukungan masanya konsisten dan tidak didasarkan pada personalitas pemimpin dan basis wilayah, memiliki kaitan kuat dengan organisasi-organisasi masyarakat tetapi tetap otonom dari mereka, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan suksesi kepemimpinan yang mulus.(Mas'ood, tt :4)

Problematika Partai Islam dalam Konsolidasi Demokrasi

Zainal A. Amir, dalam bukunya *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, menjelaskan dua penyebab proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, terkait dengan Islam politik, khususnya partai Islam, menjadi tersesat. Dua peristiwa tersebut adalah pergantian kepemimpinan dari Gus Dur ke Megawati, dan konflik internal partai politik terutama dalam partai Islam.

Dalam analisis tersebut, Zainal menjelaskan bahwa kehidupan politik pasca Soeharto memperlihatkan beberapa peristiwa penting yang menurutnya menandai kesesatan arah konsolidasi demokrasi. Salah satu yang ia catat adalah perubahan kepemimpinan nasional dari Presiden K.H. Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri melalui kudeta politik yang didorong sepenuhnya oleh nafsu kekuasaan yang luar biasa (Amir,2003) .

Zainal mengungkapkan, proses terpilihnya Gus Dur melalui *electoral democracy* pada dasarnya diawali dari kompromi politik sejumlah politisi, mayoritas adalah politisi Islam yang tergabung dalam Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, selain dari PDI-P. Sejak awal disadari bahwa koalisi tersebut memiliki kekaburan visi mengenai reformasi terutama dalam menentukan langkah apa saja yang seharusnya ditempuh oleh bangsa yang sedang menapaki masa

transisi menuju demokrasi. Hal ini pula yang menyebabkan mengapa pemerintahan Gus Dur tampak rapuh. (Amir, 2003:299)

Partai Islam, yang tercermin dalam Poros Tengah, ketika membangun koalisi terlihat untuk lebih menutupi rasa malu setelah mengalami kekalahan dalam memperoleh suara pada Pemilu 1999. Hal ini masih ditambah dengan sikap politik Megawati yang cenderung menutup jalur komunikasi dengan politikus Islam politik guna membicarakan format kekuasaan yang baru. Dalam konteks ini, Poros Tengah tersebut menemukan sinerginya dengan politisi dari Partai Golkar, yang waktu itu jelas tidak menginginkan Megawati menjadi Presiden keempat.

Dalam perjalanannya, Gus Dur dengan berbagai kebijakannya harus menelan pil pahit. Akibatnya, peristiwa politik yang dicemaskan pendukung Gus Dur terjadi, Gus Dur diberhentikan MPR tanggal 23 Juli 2001. Banyak kalangan menilai bahwa hal ini merupakan pengkhianatan politisi Indonesia terhadap UUD 1945 yang celakanya justru diamanatkan oleh orang-orang yang menjatuhkan Gus Dur. Zainal menilai bahwa kejadian ini merupakan pertanda bagi sesatnya arah konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kesesatan selanjutnya adalah tatkala merebaknya konflik internal partai politik, terutama Partai Islam, sebagai akibat dari meruyaknya kepentingan sesaat elit-elitnya yang berjaln kelindan dengan lemahnya kepemimpinan politik sipil. Zainal mencatat, konflik-konflik tersebut melanda PAN, PBB, PPP, dan PKB. Lantas apa penyebab konflik yang menimpa Islam politik tersebut? Di dalam PAN, misalnya, munculnya konflik telah membuat beberapa tokoh penting dalam partai tersebut, seperti Faisal Basri maupun Shindunata, memilih hengkang. Bagi mereka yang hengkang, PAN dilihat telah luntur warna pluralisme dan idealisme dari platformnya. Sementara dalam PBB, isu dana bantuan 1 milyar dari Presiden Habibie membuat pengurus partai ini tidak sejalan lagi.

Selain dua hal tersebut, kekalahan partai-partai Islam dalam Pemilu 1999 maupun Pemilu 2004, menurut penulis, juga memberi andil besar bagi tidak produktifnya dan tidak aktifnya partai-partai Islam dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Lalu, bagaimana menjelaskan kekalahan Islam politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi? Dari perspektif historis, peristiwa ini merupakan repetisi sejarah sebagaimana pada tahun 1955. Pada pemilu 1955, partai-partai Islam hanya mampu meraih 116 kursi dari 275 kursi dalam parlemen. Jika digabungkan lima

partai Islam yang mengikuti pemilu pada waktu itu (dari 29 partai dan golongan peserta kontestastan), partai Islam hanya mampu mengantungi 43,7 % suara. Sementara pada pemilu 1999, gabungan partai politik yang berasas Islam hanya mampu meraup 16,64 % suara (Manan, 2005) Jika dijumlahkan dengan suara dari PAN yakni 7,1% dan PKB yang mendulang 12,6%, maka jumlahnya adalah 36,34%. Sementara pada Pemilu 2004 yang lalu, partai-partai Islam yakni PPP, PKS, PBR, PBB, PPNUI, PAN, dan PKB, meraup total suara 38,35%. (Romli, 2004. : 41-44)

Repetisi sejarah tersebut -yaitu kekalahan partai-partai berasas Islam dalam pemilu- memunculkan kembali perdebatan lama yang memang belum tuntas antara apa yang diistilahkan sebagai "Islam kultural" dan "Islam struktural". Islam kultural disini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud adalah sosialisasi dan institusionalisasi ajaran islam yg dilakukan melalui upaya-upaya yang menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat/ masyarakat tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem yang Islami. Sebaliknya, Islam struktural menekankan upaya tersebut melalui penetapan sistem nasional maupun kebijakan politik yang Islami. Nah, munculnya, partai-partai Islam sesungguhnya merupakan ekspresi politik dari mereka yang dikategorikan sebagai penganut pandangan Islam struktural (Manan, 2005:138).

Dalam konteks tersebut, banyak pihak menilai bahwa kekalahan partai Islam dalam pemilu 1999, dan juga Pemilu 2004, sebetulnya juga harus dipahami sebagai kekalahan pendukung Islam struktural. Formalisme Islam yang dimanifestasikan oleh pendukung Islam struktural dalam bentuk mendirikan partai politik yang secara eksplisit berasas Islam, ternyata masih juga belum memiliki prospektif politik yang signifikan. (Abidin, 1999:216-222)

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, kekalahan partai Islam tersebut berdampak tidak munculnya agenda bersama dalam upaya memajukan demokrasi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa dilengserkannya Gus Dur, yang pada awalnya diajukan politisi Islam untuk menjadi presiden dan pada akhirnya dilengserkan sendiri. Selain itu, ego yang ada pada diri elit politisi Islam tampaknya banyak menghambat kontribusi partai Islam terhadap konsolidasi demokrasi.

Eksplanasi berikut dari kekalahan Islam politik adalah secara sosio-politik dan sosio-religius. Dilihat dari sudut ini, terdapat sejumlah faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebab

kekalahan; (1) minimnya kesiapan partai untuk mengikuti pemilu, (2) kehadiran partai Islam tidak diikuti dengan momentum yang tepat, (3) terlalu banyak berdiri partai Islam. (Manan, 2005)

Pertama, relatif pendeknya jarak waktu antara berdirinya partai politik tersebut dengan jadwal pemilu merupakan kendala serius. Hal ini membuat tidak maksimalnya sosialisasi terhadap konstituen. Ini tentu berbeda dengan partai yang telah lama berdiri dan dikenal oleh masyarakat sehingga menumbuhkan apa yang disebut sebagai "identifikasi partai" (*party identification*), yakni identifikasi diri para pendukungnya dengan partai tersebut. (Mujani, 1999:196).

Kedua, dalam perspektif psikologi massa, partai-partai Islam bukan merupakan representasi bagi ekspresi marginalisasi politik selama ini. Dalam konteks pasca Soeharto, masyarakat lebih suka menjatuhkan pilihan politik pada partai politik yang telah diidentifikasi memiliki posisi yang kontra dengan *ancient regime* dan sama-sama mengalami keterpasungan politik. Momentum inilah yang tidak bisa dimaksimalkan partai Islam.

Ketiga, fragmentasi partai Islam merupakan cermin fragmentasi politik, orientasi, kepentingan, dan egosentrisme pada elit-elit politik Islam. Hal ini memungkinkan bagi umat Islam untuk bersikap ragu terhadap kapasitas partai-partai bernafas Islam. (Manan, 2005:143-144)

Kemudian, ditinjau dari sosio-religius, kekalahan partai Islam ini disebabkan oleh kualitas religius para konstituen Islam yang tidak kondusif bagi kemenangan partai Islam. Sebagian umat Islam dinilai belum memiliki kepedulian dan kesadaran yang tinggi pada "Islam Politik" yang dapat mendorong mereka memilih partai Islam. Ada dua argumentasi yang sering muncul terkait hal ini. *Pertama*, adanya proses sekularisasi yang berlangsung secara sistematis dan intensif ditengah-tengah umat Islam. *Kedua*, makin menguatnya keinginan untuk deformalisme Islam politik. Oleh karena itu, umat Islam dipandang kurang begitu tertarik untuk mengidentifikasi dirinya ke dalam sekat-sekat politik dan ideologi politik yang sektarian, termasuk untuk berafiliasi dengan atau memilih partai-partai Islam dalam pemilu.

Minimnya dukungan pemilih, terutama pemilih dari umat Islam, terhadap partai Islam dalam pemilu juga bisa dilihat dari beberapa faktor berikut. *Pertama*, estimasi berlebihan dari kekuatan politik Islam dimana para elit Islam telalu yakin dengan mayoritas umat

Islam di Indonesia yang secara otomatis akan mendukung partai Islam. *Kedua*, keberadaan umat Islam, pada dasarnya, sebagian besar bersifat sosiologis dan bukan ideologis. *Ketiga*, terjadinya perubahan orientasi dalam pandangan politik umat Islam. *Keempat*, fragmentasi partai Islam sehingga menjadi kekuatan-kekuatan yang kecil. *Kelima*, lahirnya pandangan pragmatis dan sekuler akibat kebijakan modernisasi orde baru. (Romli, 2004 :44-46)

Partai Islam; Menatap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika bercermin dari penjelasan diatas yang mengurai berbagai persoalan seputar partai Islam dan konsolidasi demokrasi, dapatkah partai politik Islam memberikan kontribusinya yang signifikan dalam konsolidasi demokrasi? Langkah apa yang idealnya ditempuh partai Islam?

Menurut Diamond, secara teoritis, partai politik merupakan sebuah kerangka kerja kelembagaan yang penting dalam sebuah demokrasi. Sedangkan untuk bisa berperan dalam konsolidasi demokrasi, maka partai politik tidak berusaha menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode inkonstitusional atau anti demokrasi sebagai taktik yang disengaja untuk mengejar kekuasaan atau sasaran politik lainnya.

Jika menilik dari teori Diamond, maka partai Islam masih punya potensi besar dalam era konsolidasi demokrasi mengingat secara kuantitatif mereka cukup besar. Dengan jumlah yang besar, partai Islam seharusnya mampu mendesak agenda demokrasi sebagai solusi untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Dari tinjauan sejarah, para aktivis partai Islam harus menyadari bahwa biang keladi kehancuran bangsa Indonesia sesungguhnya adalah sistem politik yang menyebabkan lahirnya kekuasaan yang tidak terkontrol, bukan semata-mata persoalan Islam dan sekuler. Dengan demikian, agenda terpenting bangsa Indonesia adalah memperjuangkan tegaknya demokrasi, dan tantangan bagi partai-partai Islam adalah menjalankan dan mendampingi masyarakat dalam melakukan demokratisasi di Indonesia, sesuai dengan perannya sebagai partai politik. (Rakhmat, 2004:12)

Disamping itu, tampilan partai politik Islam juga harus diubah, terutama dari kesan sebagai partai yang haus kekuasaan *an sich* atau partai yang sektarian. Dalam konteks yang demikian, ia harus mengembalikan model partai politiknya sebagai partai politik organik.

Ada beberapa hal yang harus ditelaah berkaitan dengan watak parpol organik yang tentunya bersifat modern. Dari fungsi keanggotaan, partai organik harus berorientasi pada penyadaran dan pembebasan belenggu politik, dan tugas ini menjadi mungkin bila muncul adanya partai kader. Selain itu, ia harus berwatak terbuka dan egaliter, dengan strategi partai yang bersifat programatik. Ia juga harus mampu mengidentifikasi kepentingan publik yang paling mendasar. Jika demikian halnya, maka menjadi terbukalah peran partai politik Islam dalam kancah konsolidasi demokrasi.

Berkaitan dengan konflik yang sering melanda partai-partai Islam hingga tidak cukup mampu memberikan kontribusinya dalam konsolidasi demokrasi, secara internal harus ada pembaruan pada diri partai Islam. Pembaruan ini terutama pada aspek suksesi kepemimpinan, pola berinteraksi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, program yang ditawarkan kepada masyarakat serta kebijakan partai.

Dari segi kepemimpinan, sebuah partai politik harus memiliki kualifikasi sesuai dengan situasi kekinian, berwawasan demokratis, futuristik, pluralis, serta memiliki *moral force* yang mendalam. Kapabilitas, kapasitas serta integritas dirinya telah teruji secara matang oleh dinamika sejarah dalam berbagai konteks. Secara mendasar, pemimpin partai harus memiliki kepekaan dan kemampuan intelektual dalam menerapkan manajemen politik bervisi kerakyatan.

Yang tidak kalah penting adalah mengubah pola kampanye menjadi lebih efektif dengan memanfaatkan sarana publik serta diupayakan untuk mengurangi berbagai bentuk mobilisasi massa ke jalan-jalan. Disamping sarat dengan pendidikan politik rakyat, model kampanye demikian akan mengurangi terjadinya tindak kekerasan akibat persaingan antar partai politik.

Selain itu, langkah strategis yang harus dilakukan partai Islam adalah memperpanjang "nafas" aktivitas politik terutama yang berkaitan dengan advokasi masyarakat. Sejauh ini, selain PKS, aktivitas politik partai Islam hanya menjelang pemilu saja atau ketika kampanye. Dalam masyarakat yang kian terbuka dan memilikij preferensi yang banyak, kinerja yang demikian tidak akan menguntungkan di masa mendatang dan menjadi investasi politik yang negatif.

Dalam konteks komunikasi politik, partai-partai Islam juga harus lebih intensif dalam berhubungan dan menjaring aspirasi dengan

masyarakat, baik yang menjadi basis konstituennya maupun masyarakat secara luas. Jika partai Islam hanya berinteraksi dengan aktor-aktor di level pemerintahan, maka demokratisasi di aras masyarakat tidak akan tergarap secara maksimal. Imbasnya, proses konsolidasi demokrasi akan macet di tangan partai politik.

Jika partai Islam mampu mengubah diri, penulis yakin, peran yang bisa dimainkan partai Islam dalam konsolidasi demokrasi kian terbuka dan pada akhirnya bisa bersinergi dengan partai politik lain. Ditengah semakin melunturnya politik aliran dan paham keagamaan dalam preferensi politik masyarakat, menjadi kian penting bagi partai Islam untuk menyesuaikan diri agar tidak semakin tertinggal dan ujung-ujungnya tidak bisa memberikan andil yang signifikan dalam konsolidasi demokrasi.

Partai Islam dan Konsolidasi Demokrasi; Belajar Dari PKS

"Partai Keadilan Nanti Muncul sebagai Partai Penting" (Salim, 1999:192)

Dalam perbincangan tentang partai Islam dan konsolidasi demokrasi, peran PKS menjadi menarik untuk dijadikan arena pembelajaran. Melihat gerak dinamika PKS saat ini, dan andilnya dalam konsolidasi demokrasi, ada beberapa hal yang bisa dikemukakan.

Menurut penulis, peran signifikan PKS dalam konsolidasi demokrasi terletak pada kondusifnya sisi internal partai. Dengan begitu, aktivitas dan kebijakan partai tentu akan mendapat sokongan penuh dari, minimal, konstituennya. Selain itu, sebagai partai kader, maka tugas PKS adalah bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan kinerja dan program partai. Hal ini bisa berjalan, salah satunya, karena tidak begitu tergantung pada satu figur.

Sisi lain dari PKS adalah kian inklusifnya program atau isu yang dijual PKS dan kian terbukanya elit PKS di tingkat pusat atau daerah dalam memilih teman berkoalisi. Soal isu dan program partai, ini bisa dilihat dalam pemilu 2004 lalu, dimana PKS tidak lagi mengangkat isu-isu yang cenderung sektarian seperti penegakan syari'ah Islam, tapi isu-isu bersama seperti pemberantasan korupsi (Susanto, 2005).

Selain itu, dalam menjalin hubungan dengan partai-partai lain sebagaimana ditunjukkan ketika berkoalisi, PKS tidak lagi hanya melirik pada sesama partai Islam, tapi menjajaki teman berkoalisi berdasarkan pada program dan kontrak politik. PKS tidak lagi secara

eksklusif memilah teman yang penting partai Islam. Dalam hal ini, PKS terlihat lebih bisa memahami realitas politik.

Disamping itu, sampai saat ini, PKS sebagai partai politik, sebagaimana dijelaskan Larry Diamond, mampu membangun konstituen yang memahami program partai melalui ikatan rasionalitas dan bukan sekedar emosional. PKS juga mampu memperlihatkan diri sebagai instiuisi demokrasi yang mendukung legitimasi demokrasi, baik aturan-aturannya maupun lembaga konstitusionalnya (Diamond, 2003).

✓ Seperti diketahui, PKS merupakan partai yang memiliki mekanisme pengkaderan, rekrutmen politik, dan konsolidasi internal partai dengan cara-cara yang lain dari kebanyakan partai politik, dan ini dilakukan dengan konsisten (Tornquist, 2005: 81). PKS juga mampu membangun citra partai populis melalui program dan aktivitas politik. Inilah titik beda PKS dengan Partai Demokrat (PD). Jika PD mengandalkan figur SBY dalam menarik massa, maka PKS dipastikan tidak memiliki figur atau ikon semacam itu.

Modal penting lainnya, dari data terakhir, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW, setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kota/Kabupaten), 2155 Dewan Pimpinan Cabang (setingkat Kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS memiliki 13 cabang perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi PKS. Adapun kader inti mereka sebanyak 300.000 orang. (Rahmat, 2004 :. 32).

Dari paparan tersebut, modal awal PKS untuk berperan lebih jauh dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menemukan signifikansinya dan kian jelas asal usul dan pijkakannya.

Dengan begitu, ini tentu menjadi modal berharga dan kontribusi yang positif bagi konsolidasi demokrasi. Bahkan, Saiful Mujani meyakini, jika PKS mampu menjaga dan mengembangkan citra partainya, serta mampu mewartakan aspirasi masyarakat yang sangat beragam secara primordial, maka PKS memiliki potensi untuk membantu memantapkan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia (Mujani, 2005).

Catatan Akhir

Dari penjelasan diatas, menjadi terlihat bahwa tidak maksimalnya peran partai Islam dalam konsolidasi demokrasi disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan dari Gus Dur ke Megawati yang banyak melibatkan partai Islam sehingga energinya

lebih banyak tercurah untuk mengurus politik tingkat atas, konflik internal partai politik terutama dalam partai Islam, dan kalahnya partai-partai Islam.

Melalui perubahan sistem dan budaya kepartaian, harapan kontribusi dalam konsolidasi demokrasi yang dibebankan pada partai Islam akan lebih mendekati kenyataan, dan bukan utopia. Tentu saja, ini tinggal pada kemauan para pemangku partai Islam. Jika para petinggi partai Islam tidak ingin “halaman partai Islam” segera berakhir, maka memaksimalkan peran dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi agenda strategis dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Daftar Pustaka

- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik: Pasca Soeharto*, Pengantar, Greg Barton, Jakarta; LP3ES, 2003
- Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin (ed),, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta; Alvabet, Oktober 1999
- Diamond, Larry., *Developing Democracy Toward consolidation*, Penerjemah; Tim IRE Yogyakarta. Yogyakarta; IRE Press, Mei 2003
- Eko, Sutoro., “Pelajaran Konsolidasi Demokrasi untuk Indonesia,” Kata Pengantar dalam Larry Diamond, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995
- _____, *Tertib Politik Di tengah Pergeseran Massa*, Penerjemah; Sahat Simamora, Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 2003
- Manan, Munafrizal., *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Yogyakarta; IRE Press, September 2005
- Mas'oed, Mohtar., *Kemerosotan Demokrasi; Catatan untuk Diskusi*, tanpa tahun dan tanggal, makalah tidak diterbitkan.
- Mujani, Saiful., “Kekalahan Partai Islam”, dalam Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin (ed),, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta; Alvabet, Oktober 1999
- _____, “Fenomena PKS”, dalam Islamlib.com. Diakses tanggal 21 Oktober 2005.

Rahmat, M. Imdadun dkk., "Partai-Partai Islam; Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi No. 4 Tahun. 1999

Rahmat, M. Imdadun dan Khamami Zada. "Agenda Politik Gerakan Islam Baru," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. Edisi No. 16 tahun 2004.

Romli, Lili., "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1 No. 1, 2004

Salim, Hairus, dkk. (Penyusun). *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999.

Susanto, Happy. "Memahami Realitas PKS," dalam *Islamlib.com*. Diakses tanggal 27 Oktober 2005.

Tornquist, Olle, dkk., Tim penulis Demos. *Menjadikan Demokrasi Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*. Jakarta: Demos, 2005.

Wawancara

Azyumardi Azra, "Partai Islam Tidak Prospektif", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed), *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta; Alvabet, oktober 1999

Mardjono, Hartono, "Mega boleh Menang, Tapi...", dalam Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin (ed),, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta; Alvabet, Oktober 1999

Majalah

"Partai Dakwah di Simpang Jalan," dalam *Tempo*. 7 Agustus 2005.